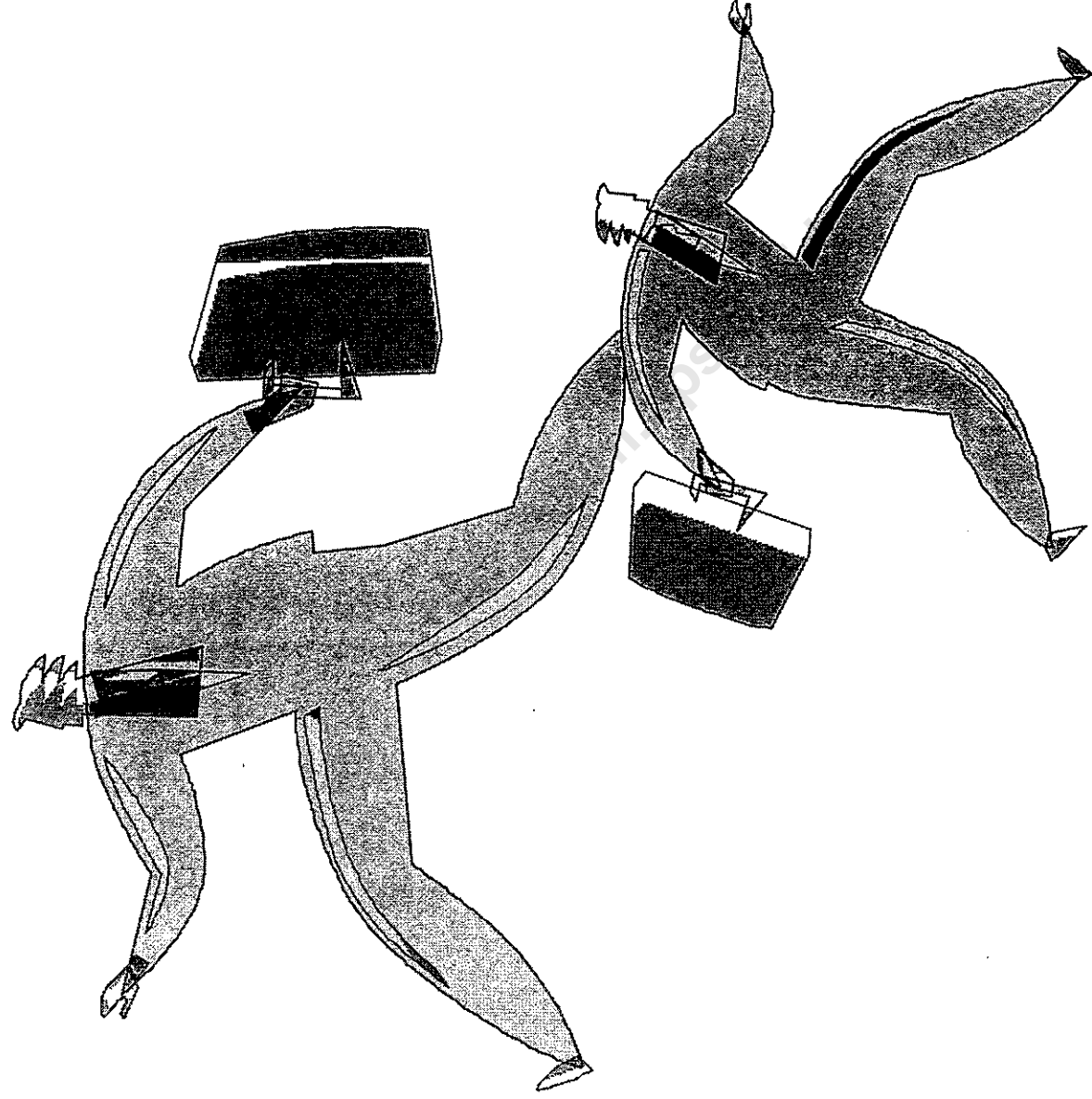


LAPORAN EKSEKUTIF
**KEADAAN ANGKATAN KERJA
DI JAWA TIMUR
2009 - 2010**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

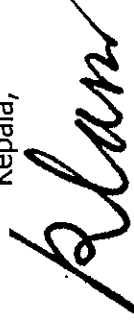
KATA PENGANTAR

Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2009-2010 ini merupakan salah satu publikasi tentang ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Laporan ini memuat ulasan ringkas dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep *Labour Force* yang telah direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO).

Data yang digunakan berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2009-2010, yang setiap tahun diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Diharapkan informasi mengenai ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur dan sekaligus untuk perencanaan serta evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini, diucapkan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan edisi tahun berikutnya sangat diharapkan.

Surabaya, September 2011
BPS Provinsi Jawa Timur
Kepala,



IRLAN INDROCAHYO, SE, M.Si
NIP. 19530805 197703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sumber Data	2

BAB II PENDUDUK USIA KERJA	3
2.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama	4
2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	6

BAB III PENDUDUK YANG BEKERJA	10
3.1 Struktur Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha	10
3.2 Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan	13
3.3 Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja	16

BAB IV TINGKAT PENGANGGUR	19
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	19
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan.....	21

LAMPIRAN	23
-----------------------	-----------

DAFTAR ISTILAH

- TPAK** : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
TKK : Tingkat Kesempatan Kerja
Informal : Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar, serta pekerja bebas (pertanian/non pertanian)
Pengangguran : Penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan sedang mencari kerja, dan atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja selama seminggu yang lalu.

Kode Kabupaten/Kota :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 01 : Kabupaten Pacitan | 20 : Kabupaten Magetan |
| 02 : Kabupaten Ponorogo | 21 : Kabupaten Ngawi |
| 03 : Kabupaten Trenggalek | 22 : Kabupaten Bojonegoro |
| 04 : Kabupaten Tulungagung | 23 : Kabupaten Tuban |
| 05 : Kabupaten Blitar | 24 : Kabupaten Lamongan |
| 06 : Kabupaten Kediri | 25 : Kabupaten Gresik |
| 07 : Kabupaten Malang | 26 : Kabupaten Bangkalan |
| 08 : Kabupaten Lumajang | 27 : Kabupaten Sampang |
| 09 : Kabupaten Jember | 28 : Kabupaten Pamekasan |
| 10 : Kabupaten Banyuwangi | 29 : Kabupaten Sumenep |
| 11 : Kabupaten Bondowoso | 71 : Kota Kediri |
| 12 : Kabupaten Situbondo | 72 : Kota Blitar |
| 13 : Kabupaten Probolinggo | 73 : Kota Probolinggo |
| 14 : Kabupaten Pasuruan | 74 : Kota Pasuruan |
| 15 : Kabupaten Sidoarjo | 75 : Kota Malang |
| 16 : Kabupaten Mojokerto | 76 : Kota Mojokerto |
| 17 : Kabupaten Jombang | 77 : Kota Madiun |
| 18 : Kabupaten Nganjuk | 78 : Kota Surabaya |
| 19 : Kabupaten Madiun | 79 : Kota Batu |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanganan masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Jawa Timur. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan pengangguran tersebut, diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Informasi tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek persediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, sehingga tidak ada penganggur. Namun hingga tahun 2010, kondisi normal yang diharapkan tersebut belum pernah tercapai. Jumlah penganggur setiap tahunnya bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Bahkan persoalannya menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Antara lain adalah perubahan struktur umur penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara jumlah persediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor pertumbuhan ekonomi yang belum berbasis investasi, sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja yang memadai. Sementara dari sisi persediaan juga memperlihatkan masih rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 19,527 juta, dan sebagian besar berada pada daerah pedesaan yaitu sekitar 60,64 persen. Besarnya persentase angkatan kerja di daerah pedesaan tentunya akan

memberikan dampak terhadap homogenitas jenis pekerjaan dan kualitas tenaga kerja di Jawa Timur. Oleh karena itu tidak mengherankan jika persentase terbesar kegiatan ekonomi di Jawa Timur masih bertumpu pada sektor pertanian (42,46 persen). Sementara dari sisi kualitas angkatan kerja yang diukur dari tingkat pendidikan, terdapat sekitar 67,27 persen dari angkatan kerja pedesaan masih berpendidikan rendah (SD ke bawah). Dua faktor tersebut nampaknya masih merupakan kendala dalam upaya meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Secara keseluruhan publikasi ini akan menyajikan data ketenagakerjaan yang meliputi jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja menurut karakteristik umur, jenis kelamin, serta pendidikan. Selain itu terdapat pula indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun sumber data yang digunakan berasal dari hasil pengumpulan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semester II Tahun 2010.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan keadaan angkatan kerja di Jawa Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Tahun 2009-2010 berdasarkan hasil Sakernas.

1.3. Sumber Data

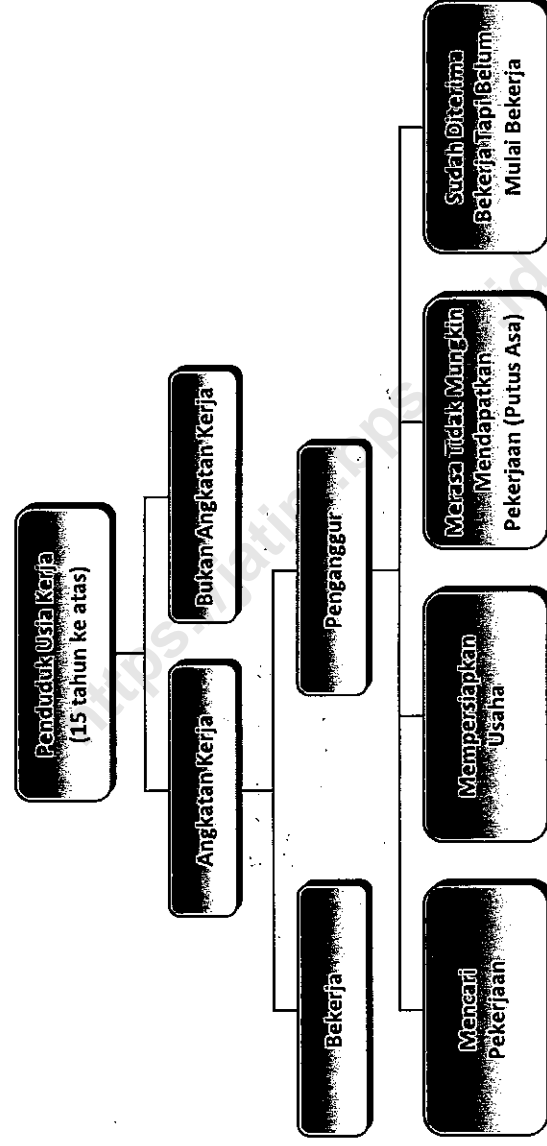
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2009-2010 berasal dari hasil pengumpulan data Sakernas yang setiap tahunnya diselenggarakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sejak Tahun 2007 ukuran sampel Sakernas untuk Provinsi Jawa Timur mengalami penambahan sampel dari 8.832 rumahtangga menjadi sekitar 30.464 rumahtangga. Dengan demikian melalui data Sakernas dapat diketahui kondisi ketenagakerjaan hingga level kabupaten/kota.

Pengumpulan data pada rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antar petugas survei dengan responden. Petugas survei terdiri dari staf BPS kabupaten/kota, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), maupun mitra statistik. Sebelum melaksanakan pendataan, petugas survei terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk memperoleh bekal pemahaman tentang konsep, definisi, serta tata cara melaksanakan survei.

2. PENDUDUK USIA KERJA

Sejalan dengan konsep ketenagakerjaan yang digunakan *International Labor Organization* (ILO), batasan usia kerja yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan penduduk usia kerja, maka berikut adalah bagan ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh ILO :

Gambar 1. Bagan Ketenagakerjaan



Dari hasil pendataan Sakernas Tahun 2010, jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 29,371 juta menjadi 28,269 juta. Pengaruh mobilitas penduduk pada kelompok usia kerja, khususnya dalam upaya mendapatkan kesempatan bekerja di luar tempat tinggalnya mengakibatkan penurunan tersebut. Meskipun dari sisi lain juga terjadi penambahan akibat perubahan komposisi penduduk berdasarkan umur, yaitu masuknya penduduk usia kerja baru. Pada tabel 1 di bawah, menunjukkan terjadinya perubahan penduduk yang bervariasi menurut kelompok dalam kurun waktu 2009 - 2010. Secara umum terjadi penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan sebaliknya terjadi peningkatan pada kelompok usia tua.

Tabel 1. Sifat dan Perilaku (SDP) Masyarakat (Kecamatan Pengasinan tahun 2009) = 2010

Kel. Umur	2009	2010
15=19	220	220
20=24	220	220
25=29	220	220
30=34	220	220
35=39	220	220
40=44	220	220
45=49	220	220
50=54	220	220
55=59	220	220
60=64	220	220
65+	220	220
Jumlah	2017/4137	2017/4137

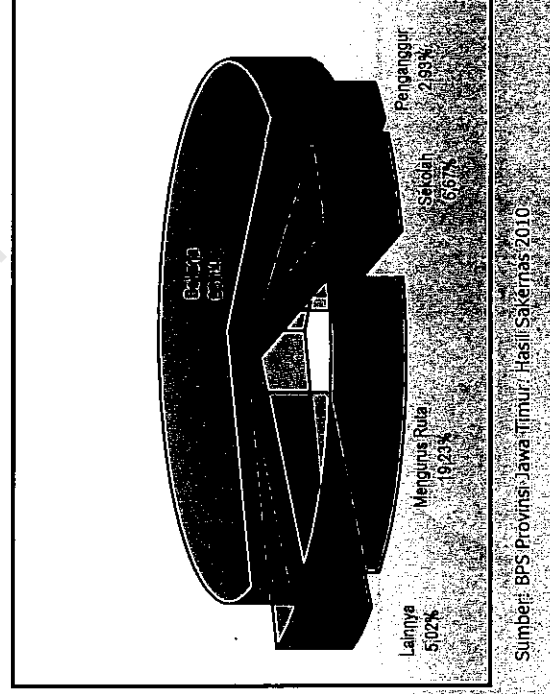
Sifat dan Perilaku (SDP) Masyarakat (Kecamatan Pengasinan tahun 2009) = 2010

Kelompok usia muda memang merupakan kelompok yang relatif lebih dinamis dalam berbagai segi terutama dalam mobilitasnya. Mereka cenderung untuk melakukan perpindahan dalam upaya mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Karena kelompok usia muda yang merupakan sumber tenaga kerja baru dituntut untuk mempunyai bekal yang cukup dari sisi pendidikan, ketrampilan maupun pengalaman kerja, supaya mereka tidak menjadi calon pengangguran yang dapat membebani masyarakat maupun pemerintah. Sementara penduduk yang berusia tua pada umumnya telah memiliki pekerjaan tetap atau sudah tidak bekerja lagi, sehingga cenderung untuk tidak melakukan perpindahan.

2.1. Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Sebagaimana skema pada Gambar 1, disebutkan bahwa penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan dan penganggur¹⁾, sedangkan yang termasuk

Gambar 2. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, Tahun 2010



1) Penganggur adalah penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, menyipakan usaha, sudah diterima tapi belum mulai bekerja dan mereka yang merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*)

bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS pada tahun 2010, di Jawa Timur terdapat 28,269 juta penduduk usia kerja. Sebagian besar dari penduduk usia kerja yang ada merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu sekitar 69,08 persen. Jika dibandingkan data tahun 2009, persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin.

Komposisi penduduk usia kerja menurut komponen ketenagakerjaan tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. Dominasi penduduk yang bekerja terjadi pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Hal ini diduga karena sistem tenaga kerja yang terjadi di sebagian besar wilayah utamanya daerah pedesaan masih menganut pola gotong royong atau kebersamaan dalam menyelesaikan suatu kegiatan termasuk kegiatan ekonomi (*worksharing* atau pekerjaan yang biasanya cukup dikerjakan oleh 1 orang namun dikerjakan oleh beberapa orang). Tidak menutup kemungkinan pola tersebut merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan industri dalam rangka mengurangi pengangguran. Kebijaksanaan tersebut tentunya akan berdampak terhadap nilai upah yang diterima atau produktivitas pekerja menjadi relatif rendah.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, kegiatan terbanyak yang dilakukan oleh penduduk usia kerja laki-laki adalah aktif dalam kegiatan

ekonomi khususnya bekerja (lihat Tabel 2). Sementara persentase terbesar kegiatan penduduk usia kerja perempuan adalah bekerja dan mengurus rumah tangga. Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa dalam hal pendidikan (kegiatan sekolah), penduduk laki-laki mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2009-2010, di Jawa Timur

Kegiatan Utama	2009		2010	
	Lk	Pr	Lk	Pr
Angkatan Kerja	84,69	54,31	84,69	54,27
- Bekerja	80,17	51,76	81,09	51,97
- Pengangguran	4,52	2,55	3,61	2,29
Bukan Angkatan Kerja	15,31	45,69	15,31	45,73
- Sekolah	7,15	6,14	6,94	6,41
- Mengurus Rوتا	2,19	35,55	2,35	35,24
- Lainnya	5,98	3,99	6,01	4,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2009 - 2010 (data diolah)

Tabel 3. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2010 di Jawa Timur

Kelompok Umur	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan				Jumlah
	SD ke Bawah	SLTP	SLTA	Dipl/Univ	
15 - 24	6,80	23,22	25,04	8,58	13,67
25 - 54	66,55	70,09	71,09	86,02	69,36
55 +	26,65	6,69	3,87	5,40	16,97
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2010 (data diolah)

Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur mengalami sedikit perubahan dibandingkan data tahun sebelumnya. Pada kelompok umur 15-24 tahun menurun dari 15,45 persen pada Tahun 2009 menjadi 13,67 persen. Penurunan ini merupakan perubahan yang cukup positif, mengingat masuknya penduduk usia 15-24 tahun ke dalam kelompok angkatan kerja diharapkan tidak semakin besar. Karena pada kelompok usia tersebut seharusnya masih terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, terutama bagi yang masih memiliki pendidikan relatif rendah. Namun sebaliknya terjadi peningkatan persentase angkatan kerja pada kelompok lainnya.

Angkatan kerja di Jawa Timur sampai dengan Tahun 2010 masih di dominasi oleh yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 54,79 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas hanya sebesar 26,77 persen. Namun jika memperhatikan tabel di atas, persentase angkatan kerja berumur 55 tahun ke atas pada tingkat pendidikan SD ke bawah relatif lebih tinggi daripada tingkat pendidikan lainnya. Artinya bahwa tingginya angkatan kerja yang berpendidikan rendah salah satunya akibat produk masa lalu.

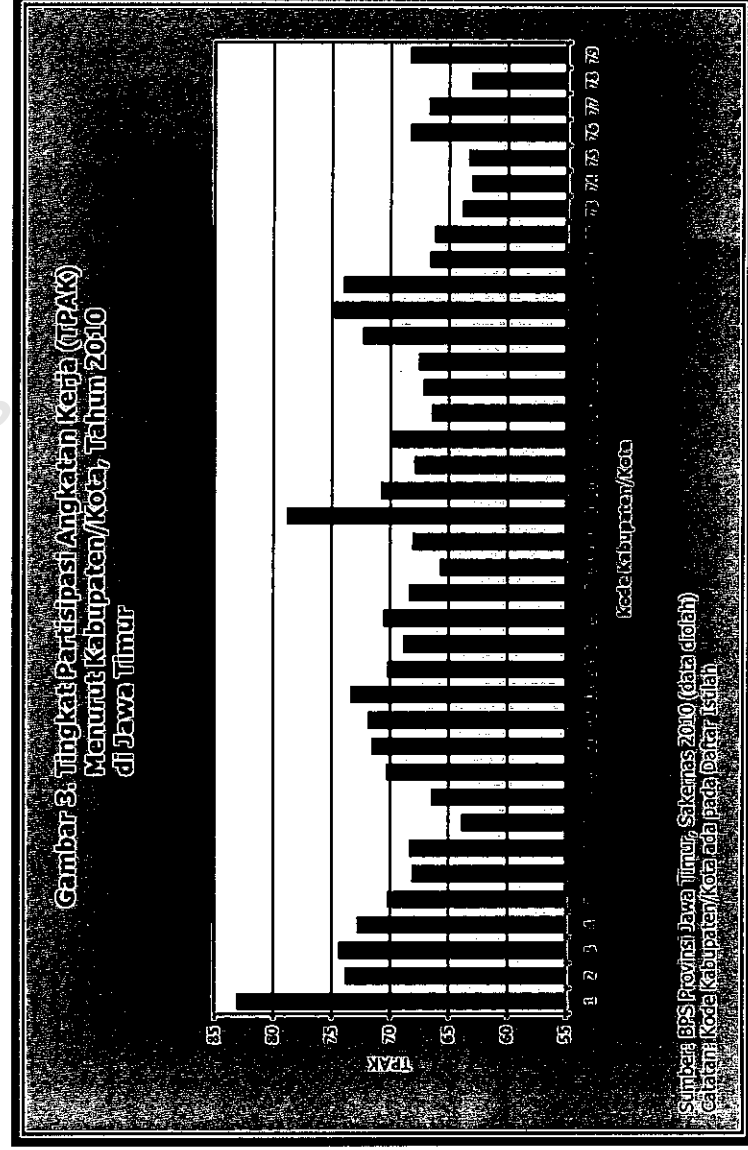
2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 69,08 yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 69 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran). Dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2009

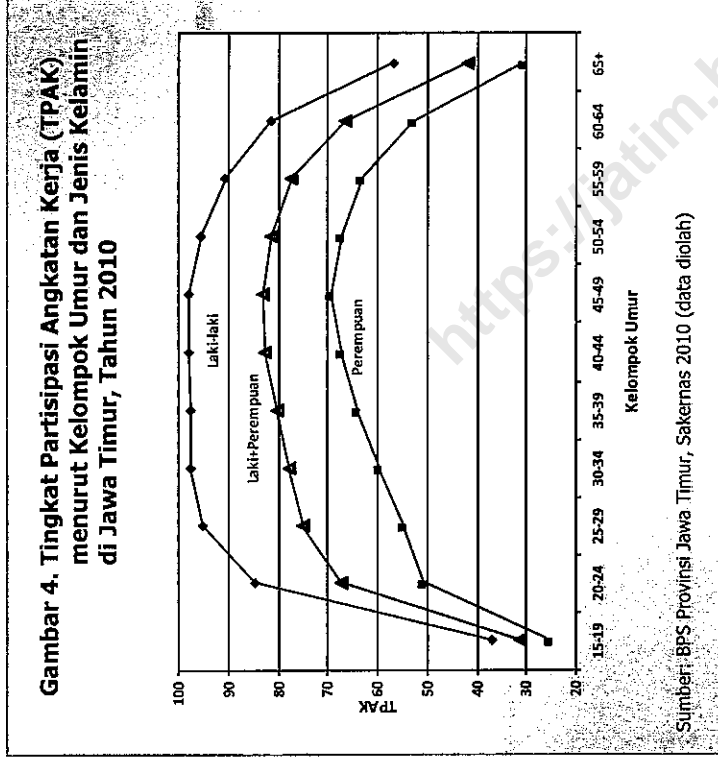
sebesar 69,25 yang berarti terjadi penurunan TPAK sebesar 0,17 persen poin. Tidak stabilnya jumlah tenaga kerja antar periode, mencerminkan bahwa kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun regional belum stabil.

Menurut jenis kelamin, besarnya TPAK masih menunjukkan pola yang serupa dengan kondisi sebelumnya, yaitu TPAK untuk laki-laki (84,69) terpaut cukup jauh dengan TPAK perempuan (54,27). Keadaan ini seringkali dikaitkan dengan budaya/tradisi masyarakat kita yang umumnya menempatkan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara sebagian besar penduduk perempuan lebih banyak melakukan kegiatan domestik seperti mengurus rumah tangga serta mengurus dan membesarkan anak.

TPAK menurut kabupaten/kota di Jawa Timur pada Tahun 2010 menunjukkan keragaman yang berkisar antara 63,00 – 83,00. Kabupaten Pacitan memiliki TPAK tertinggi, sementara Kota Probolinggo menempati posisi pada TPAK terendah. Rendah atau tingginya TPAK pada beberapa kabupaten/kota pada umumnya didukung dengan tinggi atau rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah (15–24 tahun) untuk masuk dalam kegiatan bersekolah. Karena apabila penduduk usia sekolah banyak yang terserap dalam kegiatan bersekolah, maka mereka akan cenderung untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi dan masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja.



Selanjutnya pada Gambar 4 di bawah menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Secara umum nilai TPAK mencapai titik optimal pada kelompok usia 35-54 tahun, yang berada pada kisaran di atas 80. Selanjutnya berangsur menurun pada kelompok usia di atas 54 tahun. Kemudian TPAK akan mencapai titik minimum pada kelompok usia 65 tahun ke atas, yaitu bernilai sekitar 42. Tingginya TPAK pada

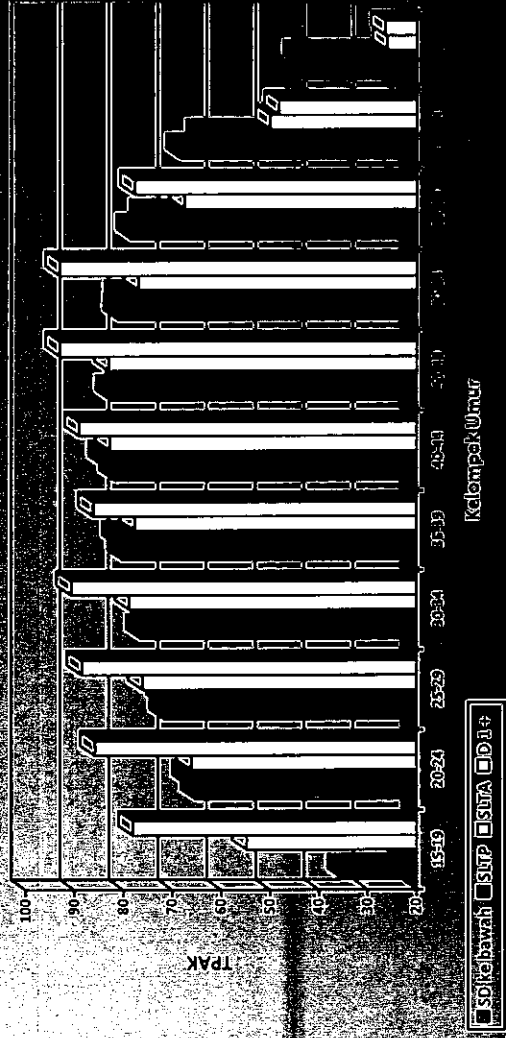


kelompok usia 35-54 tahun dapat mencerminkan bahwa penduduk pada kelompok usia tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Sementara jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, pola ini hampir tidak mengalami perubahan yang berarti.

Pada umumnya tingkat pendidikan yang ditamatkan akan mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah cenderung akan meningkatkan pula TPAK. Hal ini terjadi karena peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan akan meningkat sejalan dengan tingkat pendidikannya. Sementara pangsa kerja sekarang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis cukup memadai.

Gambar 5 menyajikan TPAK menurut tingkat pendidikan dan kelompok umur Tahun 2010. Terlihat bahwa pada kelompok usia produktif masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih banyak terserap aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pada kelompok usia tua, lebih dominan mereka yang berpendidikan rendah. Fenomena ini dapat menggugah masyarakat dan pemerintah untuk lebih mengedepankan peningkatan pendidikan dan ketrampilan dalam pembangunan.

Gambar 5. TPAK Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan di Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2010 (KPU, 6/10/10)

ps://jatim.bps.go.id

3 PENDUDUK YANG BEKERJA

Untuk mengetahui lebih kongkrit kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Tahun 2010, akan disajikan perkembangan data ketenagakerjaan periode 2009-2010 yang mencakup struktur tenaga kerja menurut sektor, status, jam kerja serta kualitas tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dan struktur umur tenaga kerja.

3.1. Struktur Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha

Kegiatan bekerja berdasarkan konsep *Labour Force*, didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi orang tua/saudara/orang lain.

Dari hasil Survei ketenagakerjaan yang dilaksanakan Bulan Agustus 2010 menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk yang terserap dalam kegiatan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3,14 persen dibandingkan tahun 2009. Sementara itu penyerapan angkatan kerja lebih banyak terjadi pada kegiatan informal. Penurunan jumlah tenaga kerja antar tahun terjadi pada sebagian besar lapangan pekerjaan yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, konstruksi, perdagangan, serta transportasi. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air minum, lembaga keuangan, serta jasa kemasyarakatan mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah tenaga kerja maupun komposisi pekerja menurut lapangan usaha, antara lain terkait dengan mobilitas penduduk, pergeseran musim, bencana, situasi ekonomi, maupun kebijakan pemerintah.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama. Tahun 2009-2010 di Jawa Timur

Lapangan Pekerjaan Utama	2009			2010		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	43,97	41,38	42,93	43,48	40,96	42,46
Industri Pengolahan	11,29	13,96	12,36	12,20	14,87	13,28
Perdagangan	15,35	27,90	20,37	15,56	27,21	20,26
Jasa/Kemasyarakatan	11,14	13,69	12,16	12,19	14,41	13,08
Lainnya	18,25	3,08	12,18	16,57	2,55	10,92
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11.576.514	7.728.542	19.305.056	11.157.045	7.541.063	18.698.108

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sekernas 2009-2010 (data diolah)
Catatan: *)Perembagan) Usrik, Gas, dan Air) Bangunan, Angkutan, Keuangan.

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan jumlah pekerja cukup tinggi adalah pada lapangan usaha lembaga keuangan yang meningkat 9,8 persen, disusul sektor jasa meningkat 4,22 persen, serta sektor industri meningkat 4,06 persen. Namun lapangan usaha jasa lebih mengarah pada kegiatan informal yang umumnya tidak membutuhkan ketrampilan khusus melainkan lebih mengutamakan kemampuan fisik (pekerja kasar). Oleh sebab itu cukup dimaklumi jika pekerja pada lapangan usaha jasa seringkali menunjukkan fluktuasi yang relatif tajam.

Disamping hal di atas, terjadi penurunan jumlah pekerja cukup tajam pada lapangan usaha transportasi yang turun 23,98 persen dan sektor listrik, gas dan air minum yang juga turun sebesar 12,71 persen. Namun demikian secara nominal penurunan jumlah tenaga kerja terbesar terjadi pada lapangan pekerjaan pertanian, transportasi, dan perdagangan. Fluktuasi yang terjadi pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan cukup dapat dimaklumi. Seperti pada lapangan usaha pertanian, jumlah pekerja sangat bergantung pada musim atau kondisi alam yang lain, maupun situasi ekonomi. Sedangkan penurunan jumlah tenaga kerja yang terjadi pada lapangan usaha perdagangan dapat terjadi karena pada umumnya skala usaha pada sektor tersebut merupakan usaha kecil dan mikro (UKM). Seperti diketahui bahwa pertumbuhan/perkembangan sektor ini relatif labil, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan atau struktur ekonomi wilayah.

Keadaan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan dapat mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang secara tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Sebagian besar tenaga kerja yang terserap pada setiap sektor mempunyai pendidikan rendah (SD ke bawah), kecuali pada sektor jasa.

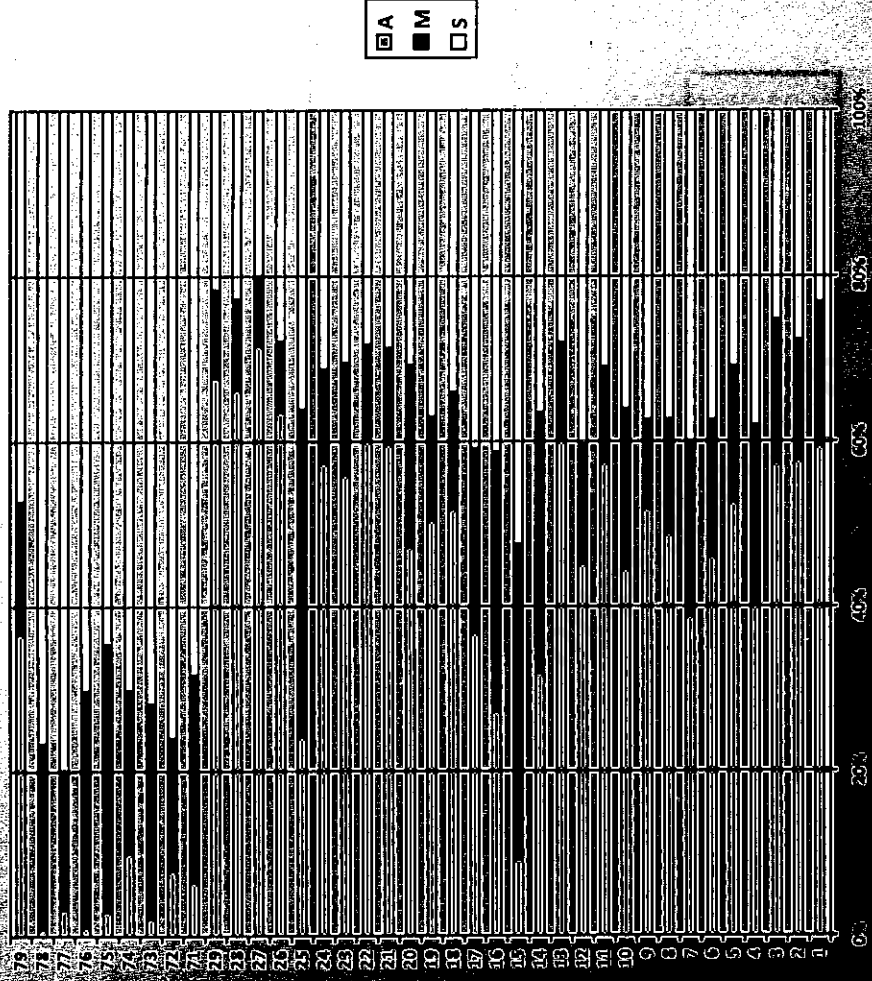
Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2010 di Jawa Timur

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lapangan Pekerjaan Utama				Jumlah	
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa		Lainnya *)
SD Ke bawah	79,38	41,39	44,10	24,40	45,41	56,29
SLTP	14,07	23,95	22,43	15,81	23,45	18,33
SLTA	6,11	30,87	29,49	30,62	25,17	19,42
Diploma ke Atas	0,44	3,79	3,97	29,16	5,97	5,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7.939.480	2.482.563	3.787.780	2.446.497	2.041.788	18.698.108

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sikemas 2010 (data diolah)
 Catatan *) Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air, Gangguan Angkutan, Keuangan.

Gambar 6. menunjukkan sebaran tenaga kerja per sektor pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara umum sektor yang dominan menyerap tenaga kerja di Jawa Timur adalah sektor Pertanian dan Perdagangan. Tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian cukup dominan pada wilayah kabupaten kecuali di Kabupaten Sidoarjo dan beberapa kabupaten lainnya. Sementara itu pada wilayah kota kecuali Kota Batu sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor Perdagangan. Hal ini cukup memberikan gambaran tentang situasi lapangan pekerjaan dikaitkan dengan kondisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri, akan menekan penyerapan tenaga kerja serta produktivitas sektor pertanian di wilayah kabupaten.

Gambar 6. Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap menurut Sektor Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tahun 2010



3.2. Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Informasi mengenai status pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi besarnya tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan formal dan informal. Konsep yang digunakan BPS tentang pekerja formal adalah pekerja yang berstatus buruh/karyawan dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap, sedangkan pekerja informal adalah mereka yang statusnya berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu

buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Menurut persepsi masyarakat awam kelompok pertama umumnya adalah mereka yang bekerja di perkantoran. Sementara itu kelompok pekerja informal umumnya adalah mereka yang bekerja tidak menentu, gaji yang diperoleh kecil dan jangka waktu penerimaan tidak tentu, lingkungan dan kondisi kerja jelek, berlokasi di pinggiran kota atau kalau ada di pusat kota mereka bekerja di kaki lima yang sering dikejar tim ketertiban umum.

Data mengenai penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Jawa Timur Tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 6. Hingga Tahun 2010, secara keseluruhan persentase terbesar penduduk yang bekerja di Jawa Timur adalah berstatus buruh/karyawan. Besarnya jumlah buruh di Jawa Timur menuntut perhatian yang khusus dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan karena antara buruh dan pengusaha seringkali tidak ada kesepakatan dalam hal perlindungan buruh maupun upah. Meskipun mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Tabel 6. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Dalam Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2010 di Jawa Timur

Status Pekerjaan Dalam Pekerjaan Utama	2009			2010		
	Laki-laki	Pemampuan	Jumlah	Laki-laki	Pemampuan	Jumlah
FORMAL	28,70	24,15	26,88	31,46	25,53	29,07
Berusaha dibantu buruh tetap	3,90	1,32	2,86	4,09	1,31	2,97
Buruh/karyawan/pegawai	24,80	22,83	24,01	27,37	24,22	26,10
INFORMAL	71,30	75,85	73,12	68,54	74,47	70,93
Berusaha sendiri	17,79	17,57	17,70	15,81	16,66	16,15
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	28,31	15,31	23,10	27,51	13,64	21,92
Pekerja bebas non pertanian	7,97	7,64	7,84	8,43	7,02	7,86
Pekerja bebas non pertanian	7,70	1,88	5,37	7,06	1,56	4,85
Pekerja keluarga/tdk dibayar	9,53	33,45	19,11	9,72	35,58	20,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11.570.514	7.723.542	10.503.050	11.157.045	7.541.038	10.000.103

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2009-2010 (data diolah)

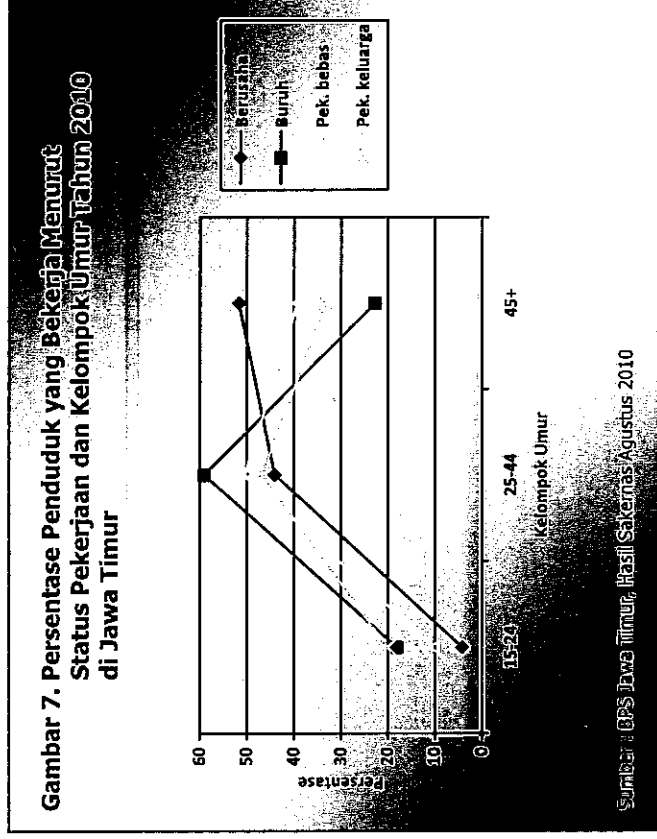
Dari pengelompokan status pekerjaan, jumlah tenaga kerja pada kegiatan formal masih berada di bawah jumlah pekerja yang terserap pada pekerjaan informal, yaitu sekitar 29,07 persen (5,44 juta orang) berbanding 70,93 persen (13,26 juta orang). Besarnya persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal, menunjukkan bahwa penduduk berupaya menciptakan pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup, karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan yang formal. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan informal harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam rangka mendorong pengembangannya, mengingat kegiatan ini umumnya merupakan kegiatan UKM (usaha kecil dan menengah) yang rentan terhadap pengaruh fluktuasi ekonomi dan politik. Apabila kegiatan informal mendapatkan perhatian yang penuh dan berkesinambungan dari semua pihak, maka kegiatan tersebut secara perlahan dan pasti akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran (Adioetomo, 2003).

Tabel 7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2010 di Jawa Timur

Status Pekerjaan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	SD ke bawah	SLTP	SLTA	Diploma	Univ.	
Berusaha	47,47	36,65	34,79	17,71	13,05	41,04
Buruh/Karyawan	11,62	28,62	48,47	77,35	83,78	26,10
Pekerja Bebas	16,99	12,15	4,64	0,59	0,22	12,71
Pekerja Keluarga	23,92	22,58	12,10	4,34	2,96	20,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Jawa Timur, Sakernas Agustus 2010 (data diolah)

Data mengenai status pekerjaan menurut pendidikan yang disajikan pada tabel di atas, dapat memberikan informasi mengenai tingkat kemandirian pekerja (*entrepreneurship*). Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran. Namun sebaliknya berdasarkan survei diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin kecil persentase penduduk usia kerja yang bekerja mandiri atau sebagai pengusaha. Sebagian besar dari mereka justru terserap sebagai buruh/karyawan. Hal ini akibat syarat pendidikan yang cukup untuk dapat masuk pada lapangan pekerjaan dewasa ini.



Kemudian bila dilihat menurut kelompok umur, masing-masing status pekerjaan memiliki pola yang berbeda, khususnya antara kelompok pengusaha dan bukan pengusaha (buruh dibayar, pekerja bebas dan pekerja tdk dibayar). Pada kelompok pertama, persentase pengusaha semakin meningkat pada kelompok usia tua (45 tahun ke atas). Sebaliknya untuk kelompok bukan pengusaha persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 25-44 tahun, yang kemudian mengalami penurunan pada kelompok umur di atasnya. Kemungkinan dengan bertambah usia, maka bertambah pula pengalaman dan kemungkinan juga keahlian serta modal, sehingga semakin banyak yang beralih menjadi pengusaha.

3.3. Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja

Semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu), diharapkan semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja baik dari sisi output maupun pendapatan pekerja. Secara umum tenaga kerja menurut jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) kurang dari 35 jam dalam seminggu yang dikenal sebagai **pekerja tidak penuh / setengah penganggur**;
- 2) lebih dari 35 jam kerja dalam seminggu atau disebut sebagai **pekerja penuh**.

Tabel 8. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2010 di Jawa Timur

Jumlah Jam Kerja	2009		2010		Total	Total
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
0 *)	1,69	1,94	1,72	1,72	1,79	1,72
1 - 9	1,40	4,24	1,21	3,79	2,53	2,25
10 - 24	11,99	24,39	15,60	24,87	16,95	16,95
25 - 34	13,43	16,31	13,77	16,23	14,58	14,76
35 - 44	23,09	20,34	20,43	18,75	21,99	19,75
45 - 59	35,21	19,85	39,33	22,72	29,06	32,63
60+	13,19	12,94	11,94	11,91	13,09	11,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11.576.514	7.728.542	11.157.045	7.541.063	19.305.056	18.698.108

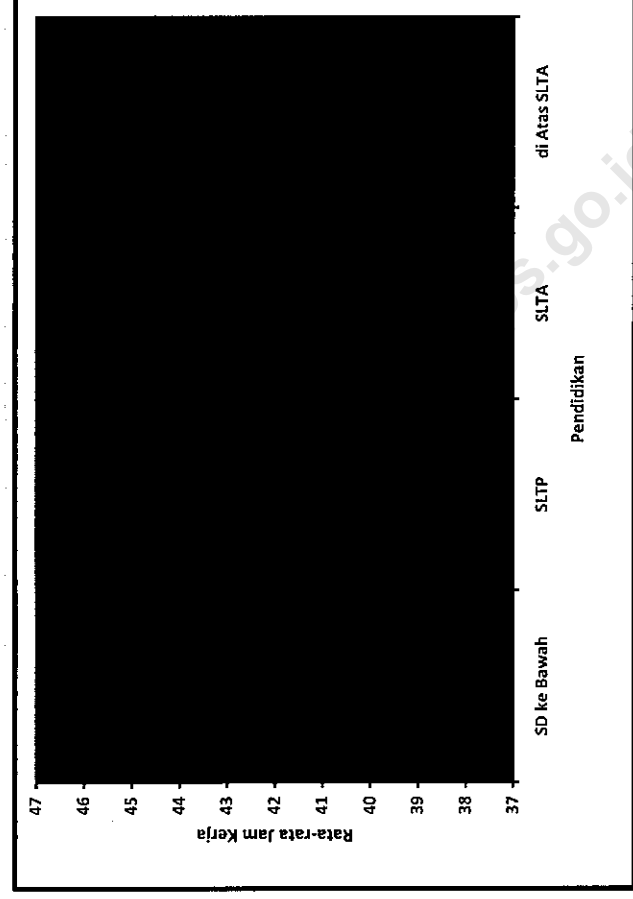
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur. Sakernas 2009 – 2010 (data diolah)
Catatan: *) penduduk sementara tidak bekerja

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa tim dewan pengupahan kabupaten/kota di Jawa Timur, dalam mengantisipasi pengurangan jumlah pekerja pada situasi krisis ekonomi seperti saat ini beberapa perusahaan mengambil kebijakan dengan mengurangi jumlah *shift* maupun jam lembur para pekerjanya. Kebijakan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi terjadinya pengangguran secara masal. Namun demikian kebijakan tersebut tentunya akan berdampak terhadap produktivitas tenaga kerja. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Timur tahun 2010, berikut disajikan data mengenai perkembangan tenaga kerja menurut jumlah jam kerja.

Pada tahun 2010, persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal sebesar 64,31 atau naik sekitar 0,17 persen poin dibandingkan tahun 2009. Dengan demikian masih ada sekitar 33,97 persen tenaga kerja yang termasuk kategori setengah penganggur atau bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). Masih besarnya jumlah setengah penganggur menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja yang ada. Selain itu juga memberikan fenomena bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2009.

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja. Dari Gambar 8 dan Tabel 8 sebelumnya, maka hubungan antara jumlah jam kerja dengan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan sifat pekerjaan, yaitu pendidikan yang lebih tinggi cenderung bekerja pada kegiatan formal yang jumlah jam kerjanya sudah pasti. Dengan pendapatan yang cukup memadai sehingga membuat mereka merasa tidak perlu bekerja lembur (*ekstra*).

Gambar 8. Rata-rata Jam Kerja Seminggu Menurut Tingkat Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2010 (data diolah)

4 TINGKAT PENGANGGUR

Secara umum konsep penganggur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran penuh (pengangguran terbuka) dan pengangguran tidak penuh. Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kerjanya di bidang ketenagakerjaan adalah tingkat penganggur terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sementara yang dimaksud setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). Setengah penganggur dibedakan dua yaitu: 1) Setengah penganggur terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan dan 2) Setengah penganggur sukarela (pekerja paruh waktu/*part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Dengan mengetahui lebih lengkap informasi mengenai tingkat penganggur di Jawa Timur, diharapkan kebijakan yang akan diambil pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Di Jawa Timur jumlah penganggur pada tahun 2010 sebanyak 0,83 juta orang atau turun sekitar 204,6 ribu orang dibandingkan data tahun 2009. Dengan demikian angka TPT di Jawa Timur mencapai 4,25 atau pada setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 4 - 5 orang penganggur. Dibandingkan angka tahun 2009, TPT menunjukkan penurunan sekitar 0,84 persen poin. Meskipun angka TPT mengalami penurunan namun angka pengangguran masih dirasa cukup tinggi, sehingga masih diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Salah satu penyebab masalah pengangguran yang tidak dapat dipungkiri adalah pola pikir pada sebagian

masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Sementara di kedua lini tersebut, kesempatan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu pula kendala lainnya yang masih dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Hal lain yang masih perlu diwaspadai adalah masih tingginya angka setengah penganggur di Jawa Timur yang mencapai 33,97 persen terhadap penduduk yang bekerja. Angka setengah penganggur memberikan indikasi bahwa penduduk yang masuk dalam kategori bekerja masih belum produktif atau waktu yang digunakan untuk bekerja berada di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam selama seminggu). Umumnya mereka bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non pertanian.

Tabel 9. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2009 - 2010, di Jawa Timur

Uraian	2009	2010	Perubahan
Jumlah Penganggur			
- Penganggur Terbuka	1.033.512	828.943	-204.569
- Setengah Penganggur	6.577.292	6.351.444	-225.848
TPT	5,08	4,25	-0,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2009 - 2010 (data diolah)

Sebaran jumlah penganggur menurut kabupaten/kota di Jawa Timur relatif heterogen, dengan besaran angka TPT berkisar antara 0,87 % (Kabupaten Pacitan) hingga 9,52 % (Kota Madiun). Sebagian besar TPT pada kabupaten/kota menunjukkan penurunan pada kurun Tahun 2009 - 2010. Untuk penurunan TPT lebih dari 1 persen selama Tahun 2009 - 2010, terdapat pada 19 kabupaten/kota. Sementara itu terdapat 8 kabupaten/kota lain yang mengalami kenaikan jumlah penganggur, yaitu: Kabupaten Ponorogo (0,38 % poin), Kabupaten Lumajang (0,93 % poin), Kabupaten Situbondo (0,85 % poin), Kabupaten Ngawi (0,31 % poin), Kabupaten Gresik (0,69 % poin), Kabupaten Bangkalan (0,78 % poin), Kabupaten Sampang (0,07 % poin), serta Kabupaten Pamekasan (1,35 % poin).

Penurunan TPT yang cukup signifikan di beberapa kabupaten/kota antara lain disebabkan adanya pergeseran musim terutama pada sektor pertanian (musim tanam yang lebih awal) sehingga sebagian buruh tani beralih pada kegiatan ekonomi lainnya seperti merajang tembakau (industri pengolahan), mulai bangkitnya perekonomian pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditandai dengan adanya pengembangan perumahan baru, pengembangan industri pada wilayah Tuban dan sekitarnya yang

berdampak pada pertumbuhan sektor lainnya, pemberdayaan kerajinan rumah tangga seperti batik di Sidoarjo, anyaman-anyaman bambu dan rotan di daerah pedesaan. Selain itu pula upaya perguruan tinggi dan lembaga swasta telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja seperti adanya pelatihan tenaga kerja oleh perguruan tinggi dari adanya kerjasama antara perusahaan dengan lembaga pendidikan.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

Peran pendidikan bagi dunia ketenagakerjaan tidak selalu memberikan dampak yang positif, utamanya apabila arah dan model pendidikan tidak mempunyai orientasi kerja. Jika demikian keadaannya, maka peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat dapat membawa problem pengangguran terbuka yang semakin meningkat pula. Meskipun angka TPT Jawa Timur Tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun jika diamati menurut tingkat pendidikannya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka angka pengangguran juga meningkat. Keadaan tersebut sejalan dengan pernyataan berikut: "Pada negara berkembang umumnya pengangguran banyak terjadi pada penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Sebaliknya pada negara maju pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah. semakin tinggi pendidikan orang semakin rendah tingkat penganggurannya (Borjas. 1996: 436)".

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2010 di Jawa Timur

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2009		2010		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SLTP ke Bawah	3,24	2,31	2,55	2,27	2,43
SLTA/SMK	10,93	13,24	8,13	11,06	9,07
D1 ke Atas	9,23	10,75	9,87	9,44	9,67
	5,34	4,70	4,26	4,22	4,25
Total	652.677	380.835	496.293	332.650	828.943

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur. Sakernas 2009 - 2010 (data diolah)

Umumnya kelompok penduduk yang berpendidikan rendah berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah (miskin), sehingga mereka tidak mungkin bertahan hidup tanpa ada pekerjaan/pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Umumnya jenis pekerjaan mereka tidak tetap atau merupakan kegiatan informal. Sehingga angka pengangguran terbuka pada kelompok pendidikan rendah cenderung lebih rendah.

Sebaliknya mereka yang berpendidikan tinggi, umumnya berasal dari keluarga "mampu" yang dapat menggantungkan kebutuhan hidupnya dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Mereka lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ditamatkannya. Oleh karena itu pada kelompok penduduk yang berpendidikan rendah, cenderung lebih rendah angka penganggurannya.

<https://jatim.bps.go.id>

Lampiran 1

**Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 - 2010**

Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja			TPAK
	2009 (2)	2010 (3)	2009 (4)	
Kabupaten				
01. Pacitan	378.136	350.337	82,97	83,00
02. Ponorogo	546.117	492.942	73,97	73,74
03. Trenggalek	409.008	387.421	75,93	74,30
04. Tulungagung	593.867	543.315	73,95	72,73
05. Blitar	612.572	593.469	69,76	70,13
06. Kediri	772.555	763.277	67,39	68,04
07. Malang	1.273.588	1.255.967	67,81	68,26
08. Lumajang	526.390	487.508	65,83	63,78
09. Jember	1.246.088	1.162.067	68,41	66,36
10. Banyuwangi	850.200	826.261	70,27	70,24
11. Bondowoso	401.708	405.185	71,33	71,48
12. Situbondo	369.875	360.595	72,73	71,78
13. Probolinggo	604.247	603.228	74,08	73,28
14. Pasuruan	796.476	792.059	70,78	70,12
15. Sidoarjo	916.206	1.001.225	66,06	68,81
16. Mojokerto	547.465	545.258	70,41	70,51
17. Jombang	693.287	610.964	69,11	68,31
18. Nganjuk	563.302	503.871	69,27	65,66
19. Madiun	351.578	347.544	67,05	68,03
20. Magetan	386.997	382.001	76,09	78,75
21. Ngawi	493.378	447.361	71,94	70,73
22. Bojonegoro	680.770	629.677	67,14	67,88
23. Tuban	601.727	599.175	69,55	69,96
24. Lamongan	652.322	597.437	68,17	66,40
25. Gresik	593.150	586.919	65,02	67,07
26. Bangkalan	473.812	432.099	68,11	67,51
27. Sampang	477.460	444.124	74,23	72,30
28. Pamekasan	469.266	438.054	76,68	74,72
29. Sumenep	610.266	599.675	73,36	73,90
Kota				
71. Kediri	134.851	134.359	64,22	66,54
72. Blitar	69.287	65.669	66,15	66,16
73. Malang	417.951	392.500	62,51	63,81
74. Probolinggo	110.116	79.425	65,26	63,00
75. Pasuruan	90.988	82.361	66,78	63,29
76. Mojokerto	61.666	61.459	66,78	68,26
77. Madiun	86.779	87.639	59,36	66,63
78. Surabaya	1.372.419	1.336.932	62,92	63,02
79. Batu	102.698	97.692	68,49	68,24
Jawa Timur	20.338.568	19.527.051	69,25	69,08

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas 2009 dan 2010 (Data Diolah)

Lampiran 2

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 - 2010**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penganggur			TPT	
	2009 (2)	2010 (3)	2009 (4)	2010 (5)	
Kabupaten					
01. Pacitan	4.994	3.031	1,32	0,87	
02. Ponorogo	18.863	18.898	3,45	3,83	
03. Trenggalek	15.976	8.312	3,91	2,15	
04. Tulungagung	26.976	19.021	4,54	3,50	
05. Blitar	18.395	13.276	3,00	2,24	
06. Kediri	39.434	28.634	5,10	3,75	
07. Malang	80.866	56.425	6,35	4,49	
08. Lumajang	11.791	15.459	2,24	3,17	
09. Jember	55.020	31.472	4,42	2,71	
10. Banyuwangi	34.460	32.415	4,05	3,92	
11. Bondowoso	11.568	6.450	2,88	1,59	
12. Situbondo	8.451	11.289	2,28	3,13	
13. Probolinggo	15.686	12.190	2,60	2,02	
14. Pasuruan	40.031	27.678	5,03	3,49	
15. Sidoarjo	93.344	83.603	10,19	8,35	
16. Mojokerto	30.315	26.381	5,54	4,84	
17. Jombang	42.926	32.175	6,19	5,27	
18. Nganjuk	22.429	18.364	3,98	3,64	
19. Madiun	21.239	19.282	6,04	5,55	
20. Magetan	14.772	9.217	3,82	2,41	
21. Ngawi	22.139	21.476	4,49	4,80	
22. Bojonegoro	30.750	20.723	4,52	3,29	
23. Tuban	25.396	17.116	4,22	2,86	
24. Lamongan	32.087	21.615	4,92	3,62	
25. Gresik	41.588	45.199	7,01	7,70	
26. Bangkalan	23.754	25.008	5,01	5,79	
27. Sampang	8.124	7.868	1,70	1,77	
28. Pamekasan	10.247	15.471	2,18	3,53	
29. Sumenep	13.849	11.343	2,27	1,89	
Kota					
71. Kediri	11.221	9.923	8,32	7,39	
72. Blitar	5.870	4.371	8,47	6,66	
73. Malang	43.623	34.085	10,44	8,68	
74. Probolinggo	9.395	5.444	8,53	6,85	
75. Pasuruan	6.891	5.956	7,57	7,23	
76. Mojokerto	5.732	4.623	9,30	7,52	
77. Madiun	9.784	8.342	11,27	9,52	
78. Surabaya	118.457	91.390	8,63	6,84	
79. Batu	7.069	5.418	6,88	5,55	
Jawa Timur	1.033.512	828.943	5,08	4,25	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas 2009 dan 2010 (Data Diolah)